

POKOK BAHASAN

Pengertian perubahan sosial, pengembangan sosial, dan pembangunan masyarakat

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa memahami pengertian perubahan sosial, pengembangan sosial, dan pembangunan masyarakat

URAIAN MATERI

1. Pengertian

- a. **Perubahan Sosial:** adalah proses perubahan struktur dan fungsi dari satu sistem sosial (Rogers). Perubahan norma- norma dalam kelompok yang bisa menimbulkan disintegrasi untuk kemudian terjadi reintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Perlu peningkatan martabat manusia agar perubahan sosial berdampak kemajuan.
- b. **Pengembangan Sosial:** yaitu proses perubahan sosial yang beraturan, berencana dan bertujuan dalam peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat secara kuantitatif dan kualitatif yang seimbang. Adanya usaha untuk mengubah kondisi sosial ekonomi masyarakat kearah kondisi yang lebih baik dengan bantuan yang dilakukan oleh pihak luar.
- c. **Pembangunan Masyarakat:** upaya terencana dan sistematis yang dilakukan oleh, untuk, dalam masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup penduduk dalam semua aspek kehidupannya di dalam suatu kesatuan wilayah. Pembangunan Masyarakat suatu gerakan yang direncanakan untuk menciptakan kondisi- kondisi bagi kemajuan sosial ekonomi masyarakat dengan partisipasi aktif dan kepercayaan sepenuh mungkin atas prakarsa masyarakat (PBB).
 - Menurut Tr. Baten, pembangunan masyarakat (desa) adalah suatu proses dimana warga masyarakat desa pertama- tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan melaksanakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut.
 - Menurut Irwin T. Sanders, pembangunan masyarakat (Community Development) adalah perpaduan atau persenyawaan dari dua bentuk kekuatan dalam masyarakat, kekuatan pertama adalah pengorganisasian masyarakat (Community Organization) dan kekuatan yang kedua pengembangan ekonomi (Economic Development). Dirumuskan oleh Sanders : $CD = CO + ED$

Yang dimaksud dengan community organization menurut Irwin T. Sanders adalah keguyuban masyarakat dalam makna yang luas artinya dengan wadah organisasi atau pengelompokan dalam masyarakat, warga masyarakat melakukan suatu proses kegiatan mengidentifikasi masalah/ kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapainya, membuat prioritas yang akan dilakukan, menenangkan pada dirinya keyakinan kuat untuk mengerjakan pekerjaan mencapai tujuan itu, mencari sumber- sumber yang diperlukan, melakukan kegiatan atas dasar kerjasama antara warga masyarakat. Dengan demikian community organization itu lebih berupa proses dan bukan bentuk kegiatan.

Irwin T. Sanders lebih lanjut menjelaskan, bahwa economic development adalah juga suatu proses kegiatan yang tujuannya untuk mencapai kemajuan ekonomi demi meningkatkan taraf kehidupan warga masyarakat. Bagaimana hubungan ketiga aspek tersebut (a, b, dan c) dalam rangka it "proses pemberdayaan masyarakat" (empowering process).

2. Dua Sisi Pembangunan Sosial

Sisi pertama adalah proses komunikasi, dan sisi kedua adalah proses mobilisasi.

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator melalui saluran atau media tertentu kepada sasaran dalam suasana atau konteks tertentu, dengan tujuan agar menimbulkan akibat atau efek tertentu. Proses komunikasi itu bertujuan untuk terjadi perubahan pada aspek kognisi, afeksi, dan psikomotorik.

Sedangkan proses mobilisasi merupakan proses penggerakan dan mengerahkan segala daya dan dana yang ada pada masyarakat untuk kepentingan pengembangan sosial di masyarakat.

3. Dua Pendekatan Pengembangan Sosial

Pertama pendekatan dari atas ke bawah (top down approach) dan ke dua pendekatan dari bawah ke atas (bottom up approach atau grass root level approach). Pendekatan mana yang terbaik dalam aplikasinya sangat bergantung kepada kondisi masyarakat, namun gabungan diantara dua pendekatan itu paling fisibel untuk dilakukan.

4. Sepuluh Langkah Strategi Untuk Pembangkitan Pengembangan Sosial di Masyarakat

a. Melalui Sumber- sumber:

- 1) Pengembangan bisa dilakukan dengan pembangkitan kesadaran pada masyarakat akan sumber- sumber yang tersedia yang sebelumnya tidak diketahui
- 2) Pengembangan bisa dilakukan penambahan/ pemberian sumber- sumber kepada masyarakat

- 3) Pengembangan bisa dilakukan dengan mengefektifkan sumber- sumber yang telah ada terutama sumber daya manusia dan energi

b. Melalui Teknologi:

- 1) Pengembangan bisa dilakukan dengan melalui perbaikan teknologi yang ada di masyarakat
- 2) Pengembangan bisa dilakukan melalui peningkatan kemampuan memecahan masalah oleh warga masyarakat

c. Melalui Pengetahuan dan Pemahaman:

- 1) Pengembangan bisa dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman warga masyarakat
- 2) Pengembangan bisa dilakukan mulai dengan suatu kegiatan yang sesuai dengan keyakinan warga masyarakat
- 3) Pengembangan bisa dilakukan melalui perubahan sejumlah keyakinan yang ada pada masyarakat

d. Melalui Nilai- nilai dan Sentimen:

- 1) Pengembangan bisa dilakukan melalui nilai- nilai dan sentimen yang ada pada masyarakat
- 2) Pengembangan bisa dilakukan melalui sentimen tertentu yang ada pada masyarakat

e. Melalui Tujuan dan Kebutuhan Yang Terasa (Felt Needs):

- 1) Pengembangan bisa dilakukan dengan berdasarkan pada sejumlah tujuan dan kebutuhan warga masyarakat
- 2) Pengembangan bisa dilakukan dengan memperkenalkan tujuan dan kebutuhan baru pada warga masyarakat

f. Melalui Norma- norma :

- 1) Pengembangan bisa dilakukan dengan kegiatan yang berdasarkan norma- norma masyarakat
- 2) Pengembangan bisa dilakukan melalui penanaman norma- norma baru

g. Melalui Posisi dan Peran :

- 1) Pengembangan bisa dilakukan Melalui kegiatan bekerja dengan sejumlah warga yang memiliki posisi dalam masyarakat
- 2) Pengembangan bisa dilakukan membagi posisi dan peran dalam masyarakat
- 3) Pengembangan bisa dilakukan menambahkan beberapa posisi dan peran baru dalam masyarakat
- 4) Pengembangan bisa dilakukan dengan membuang posisi dan peran tertentu dalam masyarakat

h. Melalui Kekuasaan, kepemimpinan dan Pengaruhnya :

- 1) Pengembangan bisa dilakukan dengan bekerja bersama figur kekuasaan dan pimpinan yang berpengaruh
- 2) Pengembangan bisa dilakukan dengan melalui konsentrasi kekuasaan, kepemimpinan, pengaruh dalam masyarakat
- 3) Pengembangan bisa dilakukan melalui difusi kekuasaan, kepemimpinan dan pengaruh dalam masyarakat

i. Melalui Strata Sosial :

- 1) Pengembangan bisa dilakukan melalui kegiatan bekerja dengan kelas sosial atas masyarakat
- 2) Pengembangan bisa dilakukan melalui kegiatan bekerja dengan kelas sosial menengah di masyarakat
- 3) Pengembangan bisa dilakukan dengan kelas sosial bawah di masyarakat
- 4) Pengembangan bisa dilakukan melalui pembentukan pola strata baru dalam masyarakat

j. Melalui Historis Hubungan Spatsial :

- 1) Pengembangan bisa dilakukan dengan kegiatan yang sedang "ngetrend" di masyarakat
- 2) Pengembangan bisa dilakukan dengan menekankan interpretasi masa lalu
- 3) Pengembangan bisa dilakukan dengan peningkatan kegiatan komunikasi di dalam masyarakat
- 4) Pengembangan bisa dilakukan dengan peningkatan kegiatan komunikasi diantara warga masyarakat dengan warga masyarakat di luar wilayahnya. (Sutaryat).

5. Latar Belakang- Sejarah Singkat Pengembangan dan Pembangunan Masyarakat di Indonesia

- a. Sejarah pembangunan Indonesia sebelum kemerdekaan.
- b. Sejarah pendidikan dan pembangunan masyarakat sesudah kemerdekaan.
- c. Usaha Pemerintah setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
- d. Rencana pembangunan Nasional setelah Supersemar (sidang MPR 1968/ masa orde baru).
- e. Rencana pembangunan pada era reformasi.

TUGAS DAN SOAL

1. Diskusikan dalam kelompok anda tentang pengertian dan definisi pengembangan sosial ?
2. Diskusikan dalam Tugas Kelompok tentang definisi pembangunan masyarakat ?
3. Cari sumber atau literature yang berkaitan dengan nomor 1 dan 2 diatas ?

REFRENSI RUJUKAN

- Allan, D. E. & Dorothy, G. J. (1976). *Community and Community Development*. Hague : Mounton & Co.
- Alma, B. (2000). *Kewirausahaan*. Bandung : ALFABETA
- Arief Budiman, (1995). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Bagoes Mantra, I. (2000). *Demografi Umum*. Yagyakarta : Pustaka Pelajar
- Bank Dunia & Bank Pembangunan Asia. (1999). *Konfrensi Pendidikan Indonesia Mengatasi Kris c AX nuju Pembaher., an*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Bappenas
- Batten, T. R. (1960). *Communities and Their Development*. London : Oxford University Press
- Budiman, A. (1995). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta : gramedia Pustaka Utama

POKOK BAHASAN

Azas, tujuan, hakekat, misi, fungsi dan arah dari pembangunan masyarakat

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mahasiswa mempelajari materi diatas diharapkan dapat menghayati pengertian azas, tujuan, hakekat, misi, fungsi dan arah dari pembangunan masyarakat

URAIAN MATERI

1. Azas Pembangunan Masyarakat

- a. - Dinamisasi- bahwa Pembangunan Masyarakat adalah kegiatan educative untuk membangkitkan peran serta masyarakat.
- Demokratisasi, bahwa pembangunan masyarakat melimpahkan kepercayaan kepada masyarakat untuk memegang inisiatif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program- program yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan taraf hidup mereka.
- Modernisasi, bahwa pembangunan masyarakat ialah upaya meningkatkan kualitas masyarakat dalam semua aspek kehidupan dengan titik berat pada peningkatan aspek sosial dan ekonomi.

Modernisasi tidak identik dengan westernisasi, karena inovasi dalam pengembangan masyarakat harus disesuaikan dengan kepribadian bangsa dan nilai- nilai yang tumbuh di masyarakat. (Sudjana).

- b. Beberapa azas pendidikan, pengembangan masyarakat
 - 1) Menurut GBHN (manfaat; usaha bersama; demokrasi; adil dan merata)
 - 2) Dep. P dan K (1976) (kelembagaan; kerjasama; serasi; inisiatif; inovasi; dan kreatif; manfaat; pembangunan dan pengembangan; ilmu amaliah dan amal ilmiah; daya guna dan tepat guna)
 - 3) Menurut Santoso (1956) (dinamisering dan swadaya masyarakat; penambahan pengetahuan dan pengertian; perbaikan dan penghidupan; pembentukan kader masyarakat; perkembangan jiwa dan usaha gotong royong teratur)
 - 4) Menurut Panitia Action Research PMD (1960) (azas kepentingan masyarakat; kebutuhan masyarakat banyak; gotong royong atau kerjasama: menyangkut seluruh aspek kehidupan)
 - 5) Menurut PBB (1957) (azas kebutuhan masyarakat banyak; sinkronisasi dan integrasi program; perubahan sikap mental; partisipasi masyarakat; motivasi dan latihan; partisipasi wanita dan pemuda; menolong diri sendiri; dukungan pemerintah; kelembagaan non pemerintah; kemajuan ekonomi dan sosial).

- 6) Menurut HD. Sudjana (1991) (dinamisasi; demokratisasi; dan modernisasi).
- 7) Menurut Sutaryat (azas dan prinsip kerja pembangunan masyarakat)
Azas dan prinsip kerja pembangunan masyarakat adalah: (a) azas swadaya, (b) azas partisipasi, (c) azas gotong royong, (d) azas kebtutuhan bersama, (e) azas manfaat, (f) azas terpadu- terkoordinasi, (g) azas demokratisasi, (h) azas dinamisasi, (i) dan azas modernisasi.

2. Tujuan, Hakekat, dan Misi Pembangunan Masyarakat

- a. Tujuan utama Perubahan Sosial, Pengembangan Sosial dan Pembangunan Masyarakat
 - 1) **Perubahan Sosial;** yang merupakan prasyarat bagi terwujudnya pembangunan masyarakat, dipergunakan untuk meningkatkan martabat manusia, adapun perubahan sosial sendiri diarahkan untuk kemajuan masyarakat.
 - 2) **Pengembangan Sosial;** untuk menetapkan langkah- langkah kearah peningkatan pengetahuan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat secara kualitas dan kuantitas.
 - 3) **Pembangunan Masyarakat;** secara umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu bagi kemajuan bidang ekonomi dan sosial bagi semua anggota masyarakat.
 - 4) **Tujuan Pembangunan Masyarakat** (peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat, pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan, dan penjabaran kebijaksanaan dan program pembangunan Nasional.
- b. Hakekat Pembangunan Masyarakat pada dasarnya pencapaian tujuan
 - 1) Peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.
 - 2) Pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan.
 - 3) Terjabarnya kebijaksanaan dan program pembangunan nasional di masing- masing pedesaan, dengan menitik beratkan pada prakarsa masyarakat itu sendiri.
- c. Tujuan dan Misi Pembangunan Masyarakat menurut Sutaryat adalah: mampu menciptakan dan mengkoordinasikan: (a) masyarakat yang gemar membangun, (b) masyarakat mandiri, (c) masyarakat kooperatif, dan (d) masyarakat partisipatif.

Keempat kondisi itu harus menjadi acuan bagi setiap pelaksanaan dan pengembangan program pembangunan masyarakat.

Masyarakat gemar membangun berarti proses pembangunan masyarakat dapat membawa masyarakat pada proses pembiasaan diri dengan berdasarkan kepada kebtuuhan membangun menjadi titik tolak utama. Dalam pada itu prosesnya dilakukan dengan cara partisipasi, kerjasama (kooperatif) berdasarkan dengan motto pembangunan masyarakat (community development) yaitu: "To help people them selves".

3. Fungsi Pembangunan Masyarakat, Membina dan Memelihara

- a. Keterpaduan pembangunan
- b. Keberlanjutan
- c. Kekeragaman
- d. Kemampuan diri
- e. Keterampilan
- f. Tahapan pembangunan
- g. Pendekatan arus bimbingan dari atas dan dari bawah

4. Arah dan Sasaran Pembangunan Masyarakat

Salah satu sasaran perubahan yang ingin dicapai sebagai wujud proses edukasi dalam Pembangunan Masyarakat adalah tumbuhnya gemar belajar (learning society).

5. Sepuluh Prinsip Pembangunan Masyarakat

- a. Kegiatan Pembangunan Masyarakat menyangkut kebutuhan dari masyarakat
- b. Usaha- usahannya bisa terpisah tetapi sinkronisasi dan intergenerasi, program yang multi purpose (packed).
- c. Perubahan sikap mental pada tahap- tahap pemulaan pembangunan.
- d. Menuntut adanya partisipasi masyarakat yang semakin meningkat.
- e. Pemberian semangat dan latihan bagi pimpinan setempat.
- f. Partisipasi wanita dan remaja/ pemuda dalam pembangunan masyarakat.
- g. Bantuan yang intensif dan ekstensif dari pemerintah dalam membantu proyek- proyek swadaya masyarakat.
- h. Dukungan kebijaksanaan pemerintah, persyaratan administrasi, pelatihan, penelitian dan mobilisasi potensi.
- i. Pemanfaatan organisasi voluntir (LSM dsb.)
- j. Kesetaraan kemajuan pembangunan ekonomi dan sosial pada tingkat lokal- regional dan nasional.

Dalam hal ini Sudjana mengungkapkan 4 prinsip pengembangan Pembangunan Masyarakat yaitu:

- **Keterpaduan**, kegiatan disusun bersama, perencanaan menggabungkan top- down dan bottom- up, pelaksanaan dan evaluasi oleh masyarakat dibantu pihak- pihak lain (pemerintah, para ahli)
- **Berkelanjutan**, PM tidak dilakukan sekaligus, melainkan secara bertahap dan terus menerus.
- **Kemampuan sendiri**, program PM disusun dan dilaksanakan dengan berangkat dari kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Keikutsertaan pihak luar untuk memberi dorongan dan bantuan sehingga masyarakat dapat mendayagunakan sumber- sumber yang mereka miliki secara efisien dan efektif.

6. Beberapa Teori Pendekatan Pembangunan Masyarakat

- a. Self Help Approach
- b. Teori Irwin T. Sanders
- c. Pendekatan terpadu (top- down approach bottom- up approach)
- d. Structural fungsional- vertical horizontal
- e. Teori W. Rostow
- f. Teori Ricardo Malthus

7. Pendekatan dan Proses Pembangunan

- a. Pendekatan
 - Top- down approach (kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah)
 - Bottom- up approach (gerakan pembangunan dari bawah, yaitu kegiatan dinamis yang dilakukan oleh masyarakat)
- b. Proses
 - On going process
 - Propelling stage of development
 - Snow balt system
 - Helping people to help them selves
 - Process edukasi

8. Sudut Pandang Pembangunan Masyarakat

- a. Pembangunan Masyarakat sebagai upaya terencana
- b. Pembangunan Masyarakat sebagai proses (on going process)
- c. Pembangunan Masyarakat sebagai metode
- d. Pembangunan Masyarakat sebagai suatu gerakan (movement)
- e. Pembangunan Masyarakat sebagai pertumbuhan dan perubahan (growth plus change)

TUGAS DAN SOAL

1. Cari buku sumber yang berkaitan dengan azas, tujuan, hakekat, misi, fungsi dan arah dari pembangunan masyarakat
2. Diskusikan dalam kelompok anda tentang azas, tujuan, hakekat, misi, fungsi dan arah dari pembangunan masyarakat
3. Sebutkan 10 prinsip pembangunan masyarakat ?

REFRENSI RUJUKAN

- Bank Dunia & Bank Pembangunan Asia. (1999). Konferensi Pendidikan Indonesia Mengatasi Krisis AX nuju Pembaher., an. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Bappenas
- Batten, T. R. (1960). *Communities and Their Development*. London : Oxford University Press
- Budiman, A. (1995). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Chambers, Robert. (1983). *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES. Christenson, A. J & Robinson, J. R. W. J. (1989). *Community Development in Perspective*. USA: Iowa State university Press, Ames
- Djoyonegoro, W. (1995). *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Pembangunan*. Jakarta: Depdikbud

POKOK BAHASAN

Komponen pembangunan masyarakat
dan keterkaitannya dalam PLS

TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa diharapkan memahami komponen
pembangunan masyarakat sebagai sistem
keterkaitannya dalam PLS sebagai proses edukasi

URAIAN MATERI

- 1. Komponen Pembangunan Masyarakat Sebagai Sistem**
 - a. Masukan lingkungan (*environment input*)
 - b. Masukan mentah (*raw input*)
 - c. Masukan sarana
 - d. Proses kegiatan
 - e. Pengaruh
 - f. Keluaran sebagai tujuan sistem

- 2. Keterkaitan Pembangunan Masyarakat dalam PLS sebagai Proses Edukasi, melalui Tahapan dan Aspek- aspek**
 - a. Resources
 - b. Technology
 - c. Knowledge and belief
 - d. Values and sentiment
 - e. Goals and Felt Needs
 - f. Norms
 - g. Positions and roles
 - h. Power leadership and influence
 - i. Social rank
 - j. Sanctions
 - k. History

- 3. Cita- cita Masyarakat Terhadap pembangunan**
 - a. Masyarakat yang membangun
 - b. Masyarakat yang memiliki keseimbangan
 - c. Masyarakat yang ingin berkejahteraan

- 4. Prinsip Tri Kondisi Dalam Pembangunan Masyarakat**
 - a. Prinsip konsistensi: serasi saling menunjang
 - b. Prinsip kontinuitas: pembangunan terus menerus
 - c. Prinsip konvergensi: pencapaian tunas (tujuan nasional)

5. Unsur Yang Perlu Diperhatikan Dalam Pembangunan Masyarakat

- a. Kepentingan masyarakat
- b. Kebutuhan masyarakat
- c. Potensi yang dimiliki
- d. Gotong royong
- e. Swadaya, swakarsa dan swasembada
- f. Partisipasi
- g. Koordinasi
- h. Kehidupan sosial budaya/ Bhineka Tunggal Ika
- i. Pandangan hidup
- j. Motivasi
- k. Empowering process

6. Wujud Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat

Buah pikiran, harta benda, tenaga, atau kombinasi dan kharisma

7. Tingkat Kebutuhan Pembangunan Masyarakat

- a. Felt needs; kebutuhan yang dirasakan
- b. Expected need; kebutuhan harapan yang akan datang
- c. Crtical need; kebutuhan karena pengaruh dari luar

Abraham H. Maslow mengemukakan 5 hirarki kebutuhan manusia.

- a. Kebutuhan Dasar (Physiological needs) – pangan, sandang, kesehatan, hiburan, rekreasi.
- b. Kebutuhan Rasa Aman (Safety needs) terhindar dari kemunduran, penyakit, kecelakaan.
- c. Kebutuhan Sosial (Social needs)- rasa memiliki, rasa kasih sayang, berkeluarga yang baik.
- d. Kebutuhan Penghargaan (esteem needs) pengakuan dan penghargaan dari pihak lain.
- e. Kebutuhan Aktualisasi Diri (Self actualization needs)

8. Perbedaan Pembangunan Masyarakat dan Pembangunan Desa

- a. Pembangunan desa: orientasi kewilayahan
- b. Pembangunan masyarakat: untuk manusianya

Empat Cara Mengkaji Pembangunan Masyarakat (Community Development)

Kita bisa mengkaji pembangunan masyarakat dari empat sudut pandang, yaitu pembangunan masyarakat: (a) sebagai suatu proses; (b) sebagai suatu metode; (c) sebagai suatu program; (d) sebagai suatu gerakan.

Pembangunan Masyarakat sebagai suatu proses tekanannya pada tahap- tahap atau langkah- langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan kegiatannya, dan mulai pengenalannya/ pemahaman dan kebutuhannya sampai selesainya kegiatan dilaksanakan dan dievaluasi. Jadi sebagai suatu proses pembangunan masyarakat

itu menempuh langkah- langkah: (a) pengenalan/ pemahaman masalah/ kebutuhan, (b) perumusan tujuan, (c) pengorganisasian kegiatan, (d) pelaksanaan kegiatan, (e) evaluasi terhadap langkah- langkah yang ditempuh dan hasil yang dicapai. Dalam setiap tahap tersebut warga masyarakat dipartisipasikan secara optimal. Dengan demikian tekanannya terletak pada apa yang terjadi pada masyarakat baik secara sosial maupun psikologi.

Pembangunan Masyarakat sebagai suatu metode mengandung arti bahwa pembangunan masyarakat dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan, cara kerja agar tujuan dapat dicapai dengan demikian tekanannya terletak pada tujuan.

Pembangunan Masyarakat sebagai suatu program berarti sebagai serangkaian prosedur dan substansi kegiatan. Dengan demikian tekanannya terletak pada tujuan Pembangunan Masyarakat sebagai suatu program berarti sebagai serangkaian prosedur dan substansi kegiatan. Dengan melakukan prosedur itu kegiatan-kegiatan pembangunan masyarakat dapat dilakukan. Pembangunan Masyarakat menurut sektor tertentu seperti kesehatan, pertanian, home industry, adalah pembangunan masyarakat sebagai program. Jadi tekanannya pada kegiatan.

Pembangunan Masyarakat sebagai suatu gerakan diartikan sebagai kegiatan yang diarahkan untuk menggerakkan warga masyarakat terhadap kegiatan, sehingga warga masyarakat itu “committed”, tidak netral, mereka memihak secara emosional pada kegiatan pembangunan masyarakat. Pembangunan Masyarakat sebagai suatu gerakan cenderung terinstitusi, mengembangkan struktur organisasi, dan mengembangkan prosedur serta paktisi profesionalnya sendiri. (Sutaryat).

TUGAS DAN SOAL

1. Coba anda terangkan perbedaan Pembangunan Masyarakat dan Pembangunan Desa?
2. Sebutkan Empat Cara Mengkaji Pembangunan Masyarakat (community Development) ?

REFRENSI RUJUKAN

- Hagul, P. (1992). *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Yogyakarta: Qyasai, Dian Desa
- Ishak Abdulhak, H. (2003). *Materi Ujian Sarjana Pendidikan Luar Sekolah STKIP Siliwangi Bandung*. BAndung: PS- PLS STKIP Siliwangi Bandung.
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Prtumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Lowry, N. (1995). *Rural Sociology*. New York: Amerikan Book Company.
- Mark, B. (1953). *Approaches to Community Development*. Brussel, N. V. Uitever., Van Hoeve.
- Moeljarto, T. (1995). *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strategi*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Mubyarto. (1994). *Kewaspadaan Masyarakat Desa Tertinggal*. Yogyakarta: Aditya Media
- Radhkrisnan, S. *Approaches To Community Development*.
- Sudardja, A. (1984). *Beberapa Issue Sosiologi Tentang Masyarakat Yang Sedang Membangun*. Dalam *Mimbar pendidikan* No. 21 Tahun 1984 IKIP Bandung.
- Sumadiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

POKOK BAHASAN

Mahasiswa mengerti tentang kebijakan dan konsepsi pembangunan masyarakat

TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa diharapkan memahami tentang kebijakan dasar dalam konteks pembangunan masyarakat

URAIAN MATERI

A. Kebijakan

1. Dasar Kebijakan

- a. Undang- Undang Dasar 1945 pasal 18 menetapkan, bahwa Indonesia dibagi dalam daerah propinsi, dan daerah propinsi dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah- daerah itu bersifat otonom atau bersifat administratif belaka. Pelaksanaan pasal tersebut diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pokok- pokok Pemerintah di Daerah (UU No. 5/74), yang menetapkan bahwa pemerintah di daerah diselenggarakan berlandaskan azas desentralisasi, azas dekonsentrasi dan azas pembantuan.

Dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah tingkat I dan daerah tingkat II sebagai daerah otonom. Daerah otonom tersebut merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka pelaksanaa azas dekonsentrasi, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi dalam wilayah- wilayah Propinsi dan Ibu Kota Negara. Wilayah Propinsi di bagi dalam wilayah- wilayah Kabupaten dan Kota. Wilayah Kabupaten dan Kota di bagi dalam Kecamatan.

Agar penyelenggaraannya dapat lebih efisien dan efektif, maka pemerintah daerah dapat melaksanakan urusan pemerintahan pusat di daerah berdasarkan atas tugas pembantuan

- b. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa menyatakan bahwa di bawah Kecamatan terdapat Kelurahan dan Desa. **Desa**, suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di

bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan RI.

Kelurahan, suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi terendah langsung di bawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Perbedaannya dengan kota, desa mempunyai tingkat kepadatan yang tidak terlalu tinggi dan biasanya kegiatan utamanya adalah sektor pertanian.

- c. Pembangunan desa disiapkan dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan dan cita-cita perjuangan nasional dengan mengkaji dan memperhitungkan implikasinya dalam berbagai aspek kehidupan nasional baik di bidang ekonomi, politik, dan pemerintahan, sosial budaya maupun pertahanan keamanan.

- d. Pembangunan desa dilaksanakan selaras dengan pembangunan nasional. Karena itu pembangunan desa merupakan penjabaran dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan di daerah.

Kunci keberhasilan pembangunan desa dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif dan efisien, termasuk hasilnya secara merata di seluruh Indonesia, adalah koordinasi dan keterpaduan antar sektor, antar sektor dan daerah, antar daerah tingkat I, antar daerah tingkat II, serta antar tingkat I dan daerah tingkat II.

- e. Pembangunan desa dapat dilihat dari beberapa segi:

Pertama, dari segi pembangunan sektoral. Pencapaian sasaran pembangunan desa dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah. Pembangunan sektoral yang dilakukan di daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensinya.

Kedua, dari segi pengembangan wilayah yang meliputi antar perdesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial ekonomi dari wilayah tersebut. Desa dan perdesaan saling terkait dan membentuk suatu sistem. Oleh karena itu, pengembangan wilayah meliputi pembangunan wilayah perdesaan yang terpadu dan saling mengisi.

Ketiga, pembangunan desa dilihat dari segi pemerintahannya. Agar tujuan dan usaha pembangunan desa dapat berhasil dengan baik, maka pemerintah desa itu perlu berfungsi dengan baik. Oleh karena itu pembangunan desa merupakan usaha mengembangkan dan memperkuat pemerintahan desa dalam rangka makin mantapnya desa untuk mampu mengurus rumah tangga sendiri.

2. Karakteristik Desa

- a. Desa yang terdapat di Indonesia beragam kondisi, karakteristik sosial ekonomi dan tingkat perkembangannya :

Berdasarkan *perkembangannya*, diukur anantara lain tingkat pendapatan, peran serta masyarakat dalam pembangunan, tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan masyarakatnya. Oleh sebab itu

dikenal desa swadaya, swakarsa, dan swasembada baik yang berada pada tingkat mula, madya, maupun yang sudah tingkat lanjut. Berdasarkan *potensi* dominan yang diolah dan dikembangkan menjadi sumber penghasilan serta lapangan usaha masyarakatnya, desa dapat digolongkan sebagai desa nelayan, desa pesawahan, desa perladangan, desa peternakan, desa perkebunan, desa kerajinan atau desa industri kecil, desa industri sedang dan besar, desa perdagangan dan sebagainya. Berdasarkan *lokasinya*, *desa* dapat dibedakan antara desa yang masih terpencil, terisolasi, desa kepulauan, dan desa dekat atau mudah aksesnya ke kota. Hal itu mempengaruhi karakteristik desa dan tingkat perkembangannya.

b. Dalam rangka perumusan kebijaksanaan pembangunan yang lebih terarah dan sesuai dengan tingkat perkembangan desa, dikelompokkan ketiga kelompok yaitu:

1) Desa cepat berkembang

Desa yang dekat dengan atau mempunyai akses yang mudah ke kota. Biasanya kegiatan ekonomi masyarakatnya sudah mulai menunjukkan diversifikasi dan tidak semata-mata bergantung pada sektor primer atau agraria saja. Masyarakatnya sudah menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaannya serta sudah mulai berorientasi pada ekonomi pasar. Kebanyakan desa cepat berkembang telah mencapai desa swasembada.

2) Desa potensial berkembang

Desa yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan pada umumnya kegiatan utama masyarakatnya di sektor primer, yaitu pertanian atau pertambangan.

Pada kelompok desa ini diversifikasi kegiatan masih terbatas, dan masyarakatnya masih menunjukkan ciri homogen dalam hal adat dan kebudayaannya. Tingkat kegiatan ekonomi pada umumnya masih subsistem, walaupun ada yang sudah menunjukkan gejala berorientasi pasar. Lokasi desa tersebut relatif jauh dari kota atau aksesnya ke kota tidak terlalu mudah. Tingkat perkembangan desa kelompok ini kebanyakan adalah swakarya walaupun desa yang telah mencapai tingkat perkembangan swasembada atau masih swadaya.

3) Desa tertinggal

Desa yang mempunyai masalah khusus atau keterbatasan tertentu, seperti keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan aksesibilitas terbatas ke pusat-pusat pemukiman lainnya. Hal tersebut telah menyebabkan terjadinya kemiskinan di desa itu serta kondisinya relatif tertinggal dari desa lainnya dalam mengikuti dan memanfaatkan hasil pembangunan nasional dan daerah. Kelompok desa ini disebut kelompok desa tertinggal. Kelompok ini akan didorong secara khusus untuk mencapai tingkat perkembangan yang lebih tinggi.

3. Pengertian pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa.
 Pembangunan masyarakat desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa, yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan), dan dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat. Pembangunan masyarakat desa mempunyai sifat integralistik yang berarti kegiatan pembangunan masyarakat desa meliputi seluruh kehidupan masyarakat desa.
 Pembangunan masyarakat desa merupakan wadah resmi dari seluruh aktivitas pembangunan yang menyangkut desa dan masyarakat desa:
 - a. Kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan dasar serta landasan kehidupan bangsa dan negara, maka titik berat pembangunan diarahkan kepada desa dan masyarakat desa secara simultan dalam usaha pembangunan negara.
 - b. Pembangunan masyarakat desa, suatu pembangunan dari masyarakat pada inti pemerintah yang rendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus menerus sebagai bagian terpenting dalam usaha pembangunan negara yang menyeluruh.
4. Pokok pikiran pembangunan masyarakat desa
 - a. Keyakinan jika keinsyafan dan tekad untuk mempertinggi tingkat kehidupan dan penghidupan rakyat dimulai dari rakyat di desa- desa.
 - b. Mempunyai sifat integralistik yang berarti pembangunan masyarakat desa harus meliputi seluruh lapangan kehidupan masyarakat desa.
5. Visi, misi, dan strategi PMD
Visi pembangunan masyarakat desa, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek atau pelaku utama dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan, menuju terwujudnya kemandirian masyarakat. Kemandirian masyarakat berarti diberi kewenangan untuk menetapkan program pembangunan sesuai esensi dan prioritas kebutuhannya, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan, mengendalikan, dan melestarikan hasil- hasil pembangunan.
Misi pembangunan masyarakat desa, meningkatkan ketahanan masyarakat desa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, melalui pengembangan kemampuan, kemandirian, dan partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam upaya mencapai misi dan tujuan PMD, maka diperlukan adanya upaya pemberdayaan masyarakat, yakni mengembangkan kemampuan, kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (*to help people to help them self*), agar masyarakat secara bertahap mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.
Strategi Pembangunan Masyarakat Desa yang juga merupakan pembangunan masyarakat desa di Indonesia adalah :
 - a. Tetap berpihak dan mendasarkan diri pada kebutuhan dasar masyarakat;

- b. Mengembangkan inspirasi, aspirasi diri pada partisipasi masyarakat;
 - c. Menggerakkan dan menghidupkan aktivitas ekonomi rakyat;
 - d. Pengorganisasian dan pelebagaan, dikelola dan menjadi tanggung jawab masyarakat sendiri;
 - e. Bantuan, bimbingan dan pembinaan pemerintah yang merupakan tanggung jawab dari semua instansi melalui koordinasi dan keterpaduan;
 - f. Pembangunan masyarakat desa dilaksanakan di perdesaan dan perkotaan;
 - g. Pengembangan teknologi tepat guna dengan mengutamakan sejumlah teknologi padat karya yang produktif dan adaptif, agar mampu mengikuti perkembangan modernisasi teknologi.
6. Tujuan Pembangunan masyarakat desa
 - a. Meningkatkan taraf hidup dan kehidupan rakyat di desa- desa yang berarti menciptakan situasi dan kondisi, kekuatan dan kemampuan dalam satu tingkat yang lebih kuat dan nyata untuk tahap- tahap pembangunan selanjutnya.
 - b. Mewujudkan desa swasembada yang berketahanan disegala bidang (IPOLEKSOSBUDHANKAM) sebagai jembatan menuju masyarakat Pancasila.
 7. Tugas pokok pembangunan masyarakat desa
 - a. Mengadakan perubahan-perubahan yang terarah kepada pembaharuan bangunan- bangunan lahir dan bathin dari desa dan masyarakat desa bagi kemajuan materiil dan spiritual;
 - b. Mengembangkan desa dan masyarakat desa sebagai subyek dan obyek pembangunan.
 8. Tugas pokok pelaksanaan pembangunan masyarakat desa
 - a. Meningkatkan serta mengembangkan desa dan masyarakat desa sebagai satuan potensi ekonomi;
 - b. Memberikan perangsang guna meningkatkan daya cipta dan karya rakyat di desa;
 - c. Memupuk dan membina kemurnian kehidupan desa sebagai suatu landasan kondisi mental, psikologi yang stabil;
 - d. Mengadakan pendidikan dan latihan bagi tenaga- tenaga pelaksana pembangunan masyarakat desa dan masyarakat, sehingga mampu dan sanggup melaksanakan gerakan pembangunan masyarakat desa;
 - e. Mengadakan KISS untuk berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat desa baik dilaksanakan oleh instansi pemerintah maupun masyarakat.
 9. Tanggung jawab penyelenggara pembangunan masyarakat desa.
 - a. Mengkoordinasikan semua sektor/ program proyek yang diarahkan ke desa- desa agar makin terintegrasi dan tepat sasaran dalam mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal;
 - b. Menumbuh kembangkan peran aktif dalam proses pembangunan sejak awal perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil pembangunan. Dalam rangka ini pemberian motivasi, bimbingan, dan stimulan

kepada keswadayaan masyarakat diarahkan untuk mempertebal rasa memiliki (*sense of belonging*).

10. Sasaran pembangunan masyarakat desa.
 - a. Bidang mental spiritual/ sosial kulturil meliputi mental, agama, pendidikan/ skill, kebudayaan nasional, kesehatan, papan/ perumahan;
 - b. Bidang fisik materil/ekonomi meliputi peningkatan produksi, penguasaan produksi dan pemasaran, prasarana ekonomi, perkreditan desa, lapangan kerja;
 - c. Bidang pemerintahan dan keterlibatan meliputi penyempurnaan dan mendinamisir pemerintah desa sehingga mampu melaksanakan pembangunan masyarakat desa, menciptakan kondisi di desa sehingga pembangunan dapat berlangsung terus menerus.
11. Azas pembangunan masyarakat desa
 - a. Azas swadaya masyarakat;
 - b. Azas gotong royong;
 - c. Azas berorientasi pada kepentingan rakyat;
 - d. Azas keseimbangan antara pemabangunan sosial dan ekonomis.
12. Pendekatan pembangunan masyarakat desa
 - a. Pendekatan umum
Pembangunan desa tetap berpegang pada segi kesejahteraan dan keamanan sebagai suatu kesatuan pola pikir, pola tindak, dan pola operasional (*prosperity dan security approach*)
 - b. Pendekatan khusus
 - 1) Terencana: teknis, ekonomi dan sosial politis;
 - a. Teknis : dapat ditatalaksana;
 - b. Ekonomis : dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Sosial politis : dapat dibenarkan.
 - 2) Simultan : komprehensif, integral dan organis
 - a. Komprehensif, mengikutsertakan seluruh anggota masyarakat desa;
 - b. Integral, memajukan dan mengembangkan seluruh lapangan penghidupan masyarakat desa;
 - c. Organis, memajukan dan perkembangan keseluruhan harus berakar pada kebutuhan dan kepentingan pokok masyarakat.
 - 3) Selektif :
 - a. Secara bidang, memberikan tekanan pada salah satu atau beberapa bidang tertentu untuk mencapai tujuan jangka panjang;
 - b. Secara lokasi, secara selektif menitikberatkan pada daerah tertentu karena kekhususan yang dimiliki.
 - 4) Pertumbuhan dan perkembangan
 13. Prinsip kebijaksanaan pembangunan masyarakat desa.
Berdasarkan azas, pendekatan dan strategi sebagaimana tersebut diatas, maka kebijaksanaan pembangunan desa mengandung prinsip

a. Prinsip integral

- 1) Pembangunan masyarakat desa dilaksanakan dalam rangka kesatuan tindak dan gerak dengan program nasional. Programnya harus saling mengisi, lengkap melengkapi, tunjang menunjang dengan program nasional;
- 2) Prinsip integral ini harus berlaku secara vertikal maupun horizontal dalam batas regional maupun nasional;
- 3) Program pelaksanaan yang didalamnya terkandung landasan, sasaran, kegiatan dan target harus menunjukkan kesatuan arah untuk tercapainya sasaran jangka pendek dalam setiap tahap pelita ataupun sasaran jangka panjang dalam rangka era pembangunan 25 tahun;
- 4) Prinsip integral ini juga berlaku untuk semua aparat pelaksana, antara pemimpin dan yang dipimpin dan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga pembangunan masyarakat desa benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah dan rakyat bersama-sama.

b. Prinsip keseimbangan

- 1) Pembangunan masyarakat desa yang berusaha meletakkan dasar perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat harus dapat mengimbangi pertumbuhan dan perkembangan sektor lainnya sebagai satuan mata rantai jaringan aktivitas ekonomi;
- 2) Harus pula ada keseimbangan antara perkembangan desa dan kota dimana kota sebagai pusat fasilitas (*center place*) dan desa-desa sebagai sumber bahan mentah dan tenaga kerja (*heterland*);
- 3) Perkembangan desa dan kota saling menciptakan pasaran dimana kota menjadi pasaran hasil produksi desa dan desa menjadi pasaran industri, sehingga perkembangannya saling menciptakan kesempatan kerja;
- 4) Keseimbangan antara kemajuan teknologi dengan kemajuan masyarakat;
- 5) Pembaharuan yang tidak menimbulkan desintegrasi sosial yang membawa efek negatif;
- 6) Keseimbangan proporsional antara pengembangan ekonomi sosial budaya politik, ketertiban, dan keamanan;
- 7) Keseimbangan tanggung jawab dan inisiatif antara pemerintah dan masyarakat.

c. Prinsip Prioritas

Dalam melaksanakan pembangunan masyarakat desa harus pula disadari adanya batas-batas kemampuan baik di bidang pembiayaan maupun di bidang keahlian sehingga kita untuk mendahulukan sektor-sektor yang strategis seperti :

- 1) Memprioritaskan bidang ekonomi sebagai instrumen atau alat yang paling utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Mendahulukan pengembangan desa yang mempunyai potensi dan kemungkinan yang paling baik;

- 3) Mendahulukan pengembangan desa- desa yang berada dalam lingkaran region ekonomi dengan mendahulukan region primer dari region sekunder.
- d. Prinsip berkelangsungan
- 1) Sasaran jangka pendek mempunyai hubungan yang berkelangsungan dengan sasaran jangka panjang;
 - 2) Sasaran utama tidak boleh berubah- berubah yang mengakibatkan kerugian baik waktu, tenaga maupun biaya serta pengorbanan lainnya;
 - 3) Setiap desa yang telah mencapai perkembangan tertentu harus dibina dan dikembangkan terus, kalau tidak desa- desa akan semakin mundur dan statis;
 - 4) Cara persuasif akan lebih menjamin kelangsungan dari pada cara instruktif;
 - 5) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan memupuk rasa tanggung jawab masyarakat dalam memelihara, membina, dan melanjutkan pengembangan yang telah dicapai;
 - 6) Melatih dan mengembangkan kepemimpinan dan kader- kader dari kalangan masyarakat desa dengan meningkatkan bekal pengetahuan dan keterampilan yang akan menjamin kontinuitas dinamisasi dan modernisasi.
- e. Prinsip keswadayaan masyarakat
- 1) Swadaya masyarakat menjadi dasar bagi pelaksanaan pembangunan masyarakat desa, sedangkan bantuan pemerintah merupakan pendorong;
 - 2) Peningkatan potensi swadaya masyarakat akan menjamin kelangsungan pembangunan masyarakat desa;
 - 3) Prinsip ini memberikan keseimbangan tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan masyarakat desa.
14. Kebijakan pembangunan masyarakat desa
- Dengan prinsip- prinsip seperti tersebut diatas, maka kebijakan pembangunan masyarakat desa adalah:
- a. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan semua program dan proyek "atas desa", berfungsi mendorong iklim dan memancing keswadayaan masyarakat, memberikan peluang menumbuhkan percaya diri dan harga diri di kalangan masyarakat;
 - b. Menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sebagai perwujudan keseimbangan yang dinamis antara hak dan kewajiban setiap warga negara RI, perlu terus dipelihara, dibina dan diarahkan serta disalurkan dalam wadah dan wahana yang tepat yang sesuai dengan kemajuan dan perubahan masyarakat dalam pembangunan desa. Partisipasi merupakan proses edukasi dalam hal mana masyarakat tahu, mau dan mampu membangun dirinya di hari esok yang lebih baik berazaskan keswadayaan dan kemandirian;

- c. Mempercepat tercapainya program pemerataan dan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan dasar (*basic needs*) maupun kebutuhan pokok minimum (*basic minimum needs*), serta lebih mempercepat pembangunan kantong- kantong kemiskinan seperti desa pantai, desa terisolir, terpencil, perbatasan, kepulauan, desa kritis, minus, sangat padat penduduk (kawasan kumuh), desa sangat jarang penduduk;
 - d. Meningkatkan ekonomi produktif masyarakat melalui berbagai peluang program sektoral, inpres, regional, swasta, yang diarahkan kewilayah pedesaan dan kesemuanya mampu menggerakkan segala sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi dan tepat waktu untuk mempercepat perbaikan ekonomi masyarakat desa sebagai subyek yang handal dalam menghadapi tantangan pembangunan.
15. Langkah- langkah pembangunan masyarakat desa.
 Dengan kebijaksanaan tersebut, maka langkah- langkah yang ditempuh dalam pembangunan masyarakat desa adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan mekanisme koordinasi pembangunan desa di semua tingkatan pemerintahan;
 - b. Menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan partisipasi masyarakat pedesaan melalui komunikasi, informasi dan edukasi, sehingga masyarakat tahu, mau dan mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan;
 - c. Mempercepat peningkatan perkembangan desa mencapai desa swasembada dengan memperkuat unsur- unsur pengembangan masing- masing desa;
 - d. Penanganan desa- desa terisolir melalui berbagai upaya pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dan kebutuhan lainnya;
 - e. Pindahan penduduk dari desa padat ke desa kurang penduduk melalui kegiatan TRANSABANGDEP, PIR, HTI dan lain- lain.
 - f. Penanganan gangguan kawasan non budidaya oleh penduduk yang bermukim di kawasan sekitarnya;
 - g. Pengembangan sumber daya yang ada di perdesaaan sehingga kreatifitas dan otoaktivitasnya dapat semakin berkembang serta kesadaran lingkungan semakin tinggi

TUGAS DAN SOAL

1. Apa tugas pokok pembangunan masyarakat ?
2. Bagaimana mengadakan perubahan yang terarah kepada pembaharuan bangunan- bangunan lahir dan bathin dari desa dan masyarakat desa bagi kemajuan materiil dan spiritual ?
3. Bagaimana mengembangkan desa dan masyarakat desa sebagai subyek dan obyek pembangunan ?

REFRENSI RUJUKAN

- Chambers, Robert. (1983). *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*. Jakarta : LP3S.
- Christenson, A. J. & Robinson, J. R. W. J. (1989). *Community Development in Perspective*. USA : Iowa State University Press, Ames
- Djoyonegoro, W. (1995). *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Pembangunan*. Jakarta: Depdikbud
- Djudju Sudjana, H. (1989). *Seri Pendidikan Luar Sekolah: Azas Kebutuhan, Pendidikan Sepanjang Hayat, Relevansi Dengan Pembangunan Masyarakat, dan Wawasan Ke Masa Depan*. Bandung: Yayasan Pendidikan Terpadu Krida I Nusantara
- Djudju Sudjana, H. (2003). *Materi Ujian Sarjana Pendidikan Luar Sekolah STKIP Siliwangi Bandung*. Bandung: PS- PLS STKIP Siliwangi Bandung.
- Engking S. Hasan, H. (1985). *Pendidikan Luar Sekolah dan Pengembangan Sosial (Garis Besar Perkuliahan)* Bandung. Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Bandung.
- (2002). *Pengembangan Model Pendidikan Keterampilan Dalam Sistem Pendidikan Terpadu Pesantren Sebagai Proses Pemberdayaan Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darussalam Kabupaten Ciamis Jawa Barat)* Disertasi. Bandung Program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- (2003). *Materi Ujian Sarjana Pendidikan Luar Sekolah STKIP Siliwangi Bandung*. Bandung: PS- PLS STKIP Siliwangi Bandung.
- Esmara, Hendra. (1986). *Politik Perencanaan Pembangunan Teori dan Prospek*. Jakarta: Gramedia
- Ginanjjar, K. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.

- Hagul, P. (1992). *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Yogyakarta, Qyasai, Dian Desa
- Ishak Abdulhak, H. (2003). *Materi Ujian Sarjana Pendidikan Luar Sekolah STKIP Siliwangi Bandung*. Bandung: PS- PLS STKIP Siliwangi Bandung
- Kartasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Lowry, N. (1995). *Rural Sociology*. New York: American Book Company.
- Mark, B. (1953). *Approaches to Community Development*. Brussel, N. V. Uitever., Van Hoeve.
- Moeljarto, T. (1995). *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strategi*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Mubyarto. (1994). *Kewaspadaan Masyarakat Desa Tertinggal*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Radhokrisnan, S. *Approaches to Community Development*
- Sudardja, A. (1984). *Beberapa Issue Sosiologi Tentang Masyarakat Yang Sedang Membangun*. Dalam *Mimbar Pendidikan* No. 20 Tahun 1984 IKIP Bandung
- Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

_____ (1999). Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama

Sutaryat, T. (1984). Perubahan Sikap dan Perubahan Sosial Dalam Konteks Pembangunan dan Modernisasi. (Salah Satu Bahan Perkuliahan Pembangunan Masyarakat). Bandung: Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Bandung.

_____ (2003). Materi Ujian Sarjana Pendidikan Luar Sekolah STKIP Siliwangi Bandung. PS- PLS STKIP Siliwangi Bandung.

Suwarsosno & Alvin. Y. S. O. (1991). Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia. Teori- teori modernisasi. Dependensi dan Sistem Dunia. Jakarta: LP3S.

Taliziduhu, Ndraha. (1987). Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta: PT. Bina Aksara.

Alfian & Tan, G. M. (1988). Kerangka Landasan Pengembangan dan Lepas Landas. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Allan, D. E. & Dorothy, G. J. (1976). Community and Community Development. Hague: Mounton & Co.

Alma, B. (2000). Kewirausahaan. Bandung: ALFABETA.

Arief Budiman. (1995). Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Sumodiningrat, G. (1999). Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- (1999). Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sutaryat, T. (1984). Perubahan Sikap dan Perubahan Sosial Dalam Konteks Pembangunan dan Modernisasi. (Salah Satu Bahan Perkuliahan Pembangunan Masyarakat). Bandung: Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Bandung.
- (2003). Materi Ujian Sarjana Pendidikan Luar Sekolah STKIP Siliwangi Bandung. PS- PLS STKIP Siliwangi Bandung.
- Suwarsosno & Alvin. Y. S. O. (1991). Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia. Teori- teori modernisasi. Dependensi dan Sistem Dunia. Jakarta: LP3S.
- Taliziduhu, Ndraha. (1987). Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta: PT. Bina Aksara.

